

BAB II TINJAUAN TEORETIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Konsep Dasar Partisipasi

2.1.1.1 Partisipasi

Partisipasi sama dengan arti peranserta, ikutserta, keterlibatan, atau proses belajar bersama saling mengerti, menganalisis, merencanakan dan melaksanakan tindakan oleh beberapa anggota Masyarakat (Bahua M, 2018). Menurut Pidarta dalam (Dwiningrum, 2015). Partisipasi adalah pelibatan seseorang atau beberapa orang dalam kegiatan. Keterlibatan dapat berupa keterlibatan mental dan emosi serta fisik dalam menggunakan segala kemampuan yang dimilikinya (berinisiatif) dalam segala kegiatan yang dilaksanakan serta mendukung pencapaian tujuan dan tanggung jawab atas segala keterlibatan. Menurut Santoso (1997) dalam (Dwiningrum, 2015) partisipasi merupakan keterlibatan mental dan emosi dari seseorang di dalam situasi kelompok yang mendorong mereka untuk menyokong kepada pencapaian tujuan kelompok tersebut dan ikut bertanggungjawab terhadap kelompoknya.

Menurut Deepa Naryan (1995) dalam (Dwiningrum, 2015) *“a valuentarary process by which people including disadvantaged (income, gender, ethnicity, education) influence or control the affect them”*, artinya suatu proses yang wajar dimana masyarakat termasuk yang kurang beruntung (penghasilan, gender, suku, pendidikan) memengaruhi atau mengendalikan pengambilan keputusan yang langsung meyangkut hidup mereka. Partisipasi menurut Huneryer dan Hecman dalam (Dwiningrum, 2015) adalah sebagai keterlibatan mental dan emosional individu dalam situasi kelompok yang mendorongnya memberi sumbangan terhadap tujuan kelompok serta membagi tanggung jawab bersama mereka. Partisipasi merupakan hak setiap warga negara untuk menentukan arah kebijakan yang dibuat pemerintah melalui pembuatan keputusan bersama baik secara langsung maupun tidak langsung.

Pentingnya partisipasi dikemukakan oleh Conyers (1991: 154-155) sebagai berikut: *pertama*, partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh

informasi mengenai kondisi, kebutuhan, dan sikap masyarakat setempat, yang tanpa kehadirannya program Pembangunan serta proyek-proyek akan gagal; *kedua*, bahwa masyarakat akan lebih mempercayai proyek atau program pembangunan jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaannya, karena mereka akan lebih mengetahui seluk-beluk proyek tersebut dan akan mempunyai rasa memiliki terhadap proyek tersebut; ketiga, bahwa merupakan suatu hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalam pembangunan masyarakat mereka sendiri.

Berdasarkan beberapa pengertian dari para ahli dapat disimpulkan bahwa partisipasi adalah keterlibatan seseorang dalam suatu kegiatan berupa emosional, mental, dan fisik untuk ikut serta bertanggung jawab melaksanakan kegiatan baik secara langsung maupun tidak langsung ataupun baik secara moriil maupun materiil untuk mendukung keberhasilan suatu program dalam mencapai tujuan. Partisipasi memiliki posisi yang krusial sebagai penentu keberhasilan suatu program yang sedang dilaksanakan, sebuah program dapat berjalan apabila terdapat partisipasi, dan sebuah program tidak akan berjalan apabila tidak ada partisipasi.

2.1.1.2 Partisipasi Masyarakat

Partisipasi Masyarakat menekankan pada “partisipasi” langsung warga dalam pengambilan keputusan pada lembaga dan proses pemerintahan. Partisipasi Masyarakat disini artinya keterlibatan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam suatu kegiatan tertentu untuk mendukung pencapaian tujuan program yang manfaatnya dapat dirasakan bersama. Masyarakat menjadi objek yang menerima dan menjalankan kebijakan pemerintah, sehingga peran Masyarakat dalam program sangat menentukan keberhasilan program. Gaventa dan Valderma dalam (Dwiningrum, 2015) menegaskan bahwa partisipasi Masyarakat telah mengalihkan konsep partisipasi menuju suatu kepedulian dengan berbagai bentuk keikutsertaan warga dalam pembuatan kebijaksanaan dan pengambilan keputusan diberbagai gelanggang kunci yang memengaruhi kehidupan warga Masyarakat.

Partisipasi masyarakat merupakan keterlibatan anggota masyarakat dalam pembangunan dan pelaksanaan (implementasi) program atau proyek pembangunan yang dilakukan dalam Masyarakat lokal. Partisipasi masyarakat memiliki ciri-ciri bersifat proaktif dan bahkan reaktif (artinya masyarakat ikut menalar baru bertindak), ada kesepakatan yang dilakukan oleh semua yang terlibat, ada Tindakan yang mengisi kesepakatan tersebut, ada pembagian kewenangan dan tanggung jawab dalam kedudukan yang setara. Partisipasi masyarakat merupakan wujud dari kesadaran, kepedulian, dan tanggung jawab masyarakat terhadap pembangunan untuk meningkatkan kualitas hidup. Dengan berpartisipasi, masyarakat dapat belajar untuk memahami bahwa pembangunan bukan sekadar tugas yang harus dilaksanakan oleh pemerintah, tetapi juga keterlibatan Masyarakat memiliki peran yang penting untuk memperbaiki mutu dan kualitas hidup. Menurut Adisasmita (2006: 36-37) pentingnya partisipasi Masyarakat dilihat dari bagaimana masyarakat mengetahui permasalahan dan kepentingan itu sendiri. Seperti:

- a. Mereka memahami sesungguhnya tentang keadaan lingkungan sosial ekonomi masyarakatnya.
- b. Mereka mampu menganalisa sebab akibat dari berbagai kejadian yang terjadi dalam masyarakat.
- c. Mereka mampu merumuskan solusi untuk mengatasi permasalahan dan kendala yang dihadapi masyarakat.
- d. Mereka mampu memanfaatkan sumber daya Pembangunan baik itu sumber daya alam (SDA), sumber daya manusia (SDM), dana dan teknologi yang dimiliki untuk meningkatkan produksi dan produktifitas dalam rangka untuk meningkatkan pembangunan masyarakat.
- e. Anggota masyarakat dengan upaya meningkatkan kemauan dan kemampuan sumber daya manusianya sehingga berlandaskan pada kepercayaan diri dan keswadayaan yang kuat mampu menghilangkan sebagian besar ketergantungan terhadap pihak luar

Berdasarkan pengertian dari beberapa ahli diatas dapat disimpulkan bahwa partisipasi Masyarakat adalah keterlibatan masyarakat untuk ikut serta

dalam penyusunan kebijakan dan ikut secara aktif bertanggung jawab terhadap suatu program untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam partisipasi masyarakat biasanya adanya kebutuhan masyarakat yang dapat dipenuhi bersama sehingga Masyarakat secara sukarela ikut serta yang akan menimbulkan rasa kepedulian untuk terlibat dalam program tertentu.

2.1.1.3 Syarat Terbentuknya Partisipasi Masyarakat

Mardikanto & Soebianto (2015: 91) dalam (Nurbaiti & Bambang, 2017) menyatakan bahwa “Tumbuh dan berkembangnya partisipasi masyarakat ditentukan oleh tiga unsur pokok yaitu: kesempatan yang diberikan kepada masyarakat, kemauan masyarakat untuk berpartisipasi dan kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi”. Berikut penjelasan masing-masing unsur pokok tumbuh berkembangnya partisipasi masyarakat:

- a. Kesempatan untuk berpartisipasi. Dalam kenyataan banyak program pembangunan yang kurang memperoleh partisipasi masyarakat karena kurangnya kesempatan yang diberikan kepada masyarakat. Kesempatan yang dimaksud salah satunya yaitu kesempatan memperoleh informasi pembangunan, kesempatan memanfaatkan dan memobilisasi sumber daya dan kesempatan mengembangkan kepemimpinan yang mampu menumbuhkan, menggerakkan dan mengembangkan serta memelihara partisipasi masyarakat.
- b. Kemampuan untuk berpartisipasi. Kesempatan yang disediakan untuk masyarakat akan tidak berarti jika masyarakatnya tidak memiliki kemampuan untuk berpartisipasi. Kemampuan disini berarti kemampuan untuk membangun atau memperbaiki mutu hidupnya, kemampuan dalam pembangunan yang dipengaruhi tingkat pendidikan dan keterampilan yang dimiliki, dan kemampuan memecahkan masalah yang sedang dihadapi dengan menggunakan sumber daya dan peluang.
- c. Kemauan untuk berpartisipasi. Kemauan yang dimiliki masyarakat untuk membangun dan memperbaiki kehidupannya seperti kemandirian, dapat memecahkan masalah, dan kepercayaan diri atas kemampuannya.

2.1.1.4 Bentuk-Bentuk Partisipasi Masyarakat

Partisipasi menurut Effendi dalam (Dwiningrum, 2015) terbagi atas partisipasi vertikal dan partisipasi horizontal. Disebut partisipasi vertikal karena terjadi dalam kondisi tertentu, Masyarakat terlibat atau mengambil bagian dalam suatu program pihak lain, dalam hubungan di mana masyarakat berada sebagai status bawahan, pengikut atau klien. Sedangkan partisipasi horizontal, masyarakat mempunyai prakarsa di mana setiap anggota atau kelompok masyarakat berpartisipasi horizontal satu dengan yang lainnya. Partisipasi ini merupakan permulaan tumbuhnya masyarakat yang mampu berkembang secara mandiri.

Beberapa bentuk partisipasi yang dapat diberikan Masyarakat menurut Menurut Davis (1995) dan Sastropetro (1998) dalam (Purwandari & Mussadun, 2015), antara lain:

- a. Pikiran, merupakan jenis partisipasi pada level pertama yang digunakan oleh individu atau kelompok untuk mencapai tujuan.
- b. Tenaga, merupakan jenis partisipasi pada level kedua untuk mendayagunakannya secara individu ataupun kelompok untuk mencapai tujuan.
- c. Pikiran dan tenaga, merupakan jenis partisipasi pada level ketiga yang digunakan bersama-sama dalam suatu kelompok untuk mencapai tujuan.
- d. Keahlian, merupakan jenis partisipasi pada level keempat untuk menentukan suatu kebutuhan.
- e. Barang, merupakan jenis partisipasi pada level kelima untuk membantu mencapai hasil yang diinginkan.
- f. Uang, merupakan jenis partisipasi pada level keenam, sebagai alat untuk mencapai hasil yang diinginkan.

2.1.1.5 Macam-Macam Partisipasi dalam Masyarakat

Cohen dan Uphoff dalam (Dwiningrum, 2015) membedakan partisipasi menjadi empat jenis, yaitu pertama, partisipasi dalam pengambilan keputusan. Kedua, partisipasi dalam pelaksanaan. Ketiga, partisipasi dalam pengambilan kemanfaatan. Dan keempat, partisipasi dalam evaluasi. Keempat jenis partisipasi tersebut bila dilakukan bersama-sama akan memunculkan aktivitas pembangunan

yang terintegrasi secara potensial. *Pertama*, partisipasi dalam pengambilan keputusan. Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan ini terutama berkaitan dengan penentuan alternatif dengan masyarakat untuk menuju kata sepakat tentang berbagai gagasan yang menyangkut kepentingan bersama. Partisipasi dalam hal pengambilan keputusan ini sangat penting, karena Masyarakat menuntut untuk ikut menentukan arah dan orientasi pembangunan. Menurut Cohen dan Uphoff dalam (Dwiningrum, 2015) wujud dari partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan ini bermacam-macam, seperti kehadiran rapat, diskusi, sumbangan pemikiran, tanggapan atau penolakan terhadap program yang ditawarkan. Dengan demikian partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan ini merupakan suatu proses pemilihan alternatif berdasarkan pertimbangan yang menyeluruh dan rasional.

Kedua, partisipasi dalam pelaksanaan. Partisipasi Masyarakat dalam pelaksanaan program merupakan lanjutan dari rencana yang telah disepakati sebelumnya, baik yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, maupun tujuan. Di dalam pelaksanaan program, sangat dibutuhkan keterlibatan berbagai unsur, khususnya pemerintah dalam kedudukannya sebagai fokus atau sumber utama pembangunan. Menurut Ndraha dan Cohen dan Hoff dalam (Dwiningrum, 2015) ruang lingkup partisipasi dalam pelaksanaan suatu program meliputi: *pertama*, menggerakkan sumber daya dan dana. *Kedua*, kegiatan administrasi dan koordinasi dan ketiga penjabaran program. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dalam partisipasi pelaksanaan program merupakan satu unsur penentu keberhasilan program itu sendiri.

Ketiga, partisipasi dalam pengambilan manfaat. Partisipasi ini tidak terlepas dari kualitas maupun kuantitas dari hasil pelaksanaan program yang bisa dicapai. Dari segi kualitas, keberhasilan suatu program akan ditandai dengan adanya peningkatan output, sedangkan dari segi kualitas dapat dilihat seberapa besar persentase keberhasilan program yang dilaksanakan, apakah sesuai dengan target yang telah ditetapkan. *Keempat*, partisipasi dalam evaluasi. Partisipasi masyarakat dalam evaluasi ini berkaitan dengan masalah pelaksanaan program secara menyeluruh. Partisipasi ini bertujuan untuk mengetahui apakah

pelaksanaan program telah sesuai dengan rencana yang ditetapkan atau ada penyimpangan. Secara singkat partisipasi menurut Cohen dan Uphoff dalam (Dwiningrum, 2015) dijelaskan pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. 1 Tahap pelaksanaan program partisipasi

No.	Tahap	Deskripsi
1.	Pengambilan Keputusan	Penentuan alternatif dengan Masyarakat untuk menuju kesepakatan dari berbagai gagasan yang menyangkut kepentingan bersama.
2.	Pelaksanaan	penggerakan sumber daya dan dana. Dalam pelaksanaan merupakan penentu keberhasilan program yang dilaksanakan.
3.	Pengambilan manfaat	Partisipasi berkaitan dengan kualitas hasil pelaksanaan program yang bisa dicapai.
4.	Evaluasi	Berkaitan dengan pelaksanaan program secara menyeluruh. Partisipasi ini bertujuan mengetahui bagaimana pelaksanaan program berjalan.

2.1.1.6 Faktor Penyebab Tinggi dan Rendahnya Partisipasi Masyarakat

Faktor internal, menurut Sunarti (2003), Chapin dan Goldhamer (1993), dan Sastropetro (1998) dalam Slamet (1994) yaitu mencakup karakteristik individu yang dapat mempengaruhi individu tersebut untuk berpartisipasi dalam suatu kegiatan (Yanti et al., 2019).

a. Faktor internal

- 1) Kondisi sosial menurut Sunarti (2003) dan Slamet (1994) terdiri dari
- 2) Kondisi sosial menurut Sunarti (2003) dan Slamet (1994) terdiri dari:
 - a) Usia, mempengaruhi partisipasi karena umur mempengaruhi pola pikir dan cara berpikir seseorang.

- b) Jenis kelamin, mempengaruhi partisipasi masyarakat karena hal ini berhubungan dengan stigma masyarakat terhadap jenis kelamin tertentu. Partisipasi yang diberikan oleh seorang pria dan wanita dalam pembangunan adalah berbeda.
 - c) Jumlah tanggungan keluarga, mempengaruhi partisipasi masyarakat karena hal ini berhubungan dengan penghasilan dan waktu untuk memperoleh penghasilan yang cukup untuk menanggung beban tersebut.
 - d) Pendidikan, mempengaruhi partisipasi masyarakat karena hal ini berhubungan dengan pengetahuan tentang program partisipasi masyarakat.
 - e) Lamanya tinggal, mempengaruhi partisipasi masyarakat karena hal ini berhubungan dengan perasaan memiliki terhadap lingkungannya.
- 3) Kondisi ekonomi menurut Sunarti (2003) dan Slamet (1994) terdiri dari:
- a) Jenis pekerjaan dan jumlah pendapatan, mempengaruhi partisipasi masyarakat karena hal ini berhubungan dengan waktu, tenaga dan pikiran yang dihabiskan dalam menjalankan pekerjaannya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
- 4) Perubahan sikap dan tingkah laku menurut Sunarti (2003), Chapin dan Goldhamer (1993) dalam Slamet (1994), serta Sastropetro (1998) terdiri:
- a) Intensitas kehadiran, mempengaruhi partisipasi masyarakat karena hal ini berhubungan dengan dorongan dalam diri masyarakat untuk aktif dalam kegiatan partisipasi.
 - b) Informasi, mempengaruhi partisipasi masyarakat karena hal ini dapat mengubah persepsi masyarakat.
 - c) Komunikasi, mempengaruhi partisipasi masyarakat karena komunikasi yang terjalin dengan baik antara pemerintah dan masyarakat akan mendorong keaktifan masyarakat.

b. Faktor Eksternal

Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar individu yang dapat mempengaruhi individu untuk berpartisipasi dalam suatu kegiatan menurut Sunarti (2003) (Purwandari & Mussadun, 2015) terdiri dari:

- 1) Intensitas sosialisasi, mempengaruhi partisipasi masyarakat karena sosialisasi aktif dari pemerintah akan meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
- 2) Stimulus dari pemerintah atau pihak luar, mempengaruhi partisipasi masyarakat karena hal itu dibutuhkan dan dapat mendorong partisipasi masyarakat.
- 3) Kapasitas dan kapabilitas pemimpin, mempengaruhi partisipasi masyarakat karena figur tokoh dan pemimpin saat ini masih dibutuhkan oleh masyarakat.
- 4) Keaktifan fasilitator, mempengaruhi partisipasi masyarakat karena fasilitator sangat dibutuhkan dalam pendampingan program partisipasi masyarakat.
- 5) Pengaruh masyarakat dari luar, mempengaruhi partisipasi masyarakat karena masyarakat yang semakin mudah terhubung satu dengan yang lain akan mudah mendapat pengaruh dari luar.

2.1.2 Program Kampung Iklim

2.1.2.1 Pengertian Program Kampung Iklim

Menurut Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Program Kampung Iklim dalam pasal 1 ayat 2 menyebutkan bahwa Program Kampung Iklim atau disebut Proklim adalah program berlingkup nasional yang dikelola oleh Kementerian Lingkungan Hidup dalam rangka mendorong masyarakat untuk melakukan peningkatan kapasitas adaptasi terhadap dampak perubahan iklim dan penurunan emisi gas rumah kaca serta memberikan penghargaan terhadap upaya-upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim yang telah dilaksanakan di tingkat lokal sesuai dengan kondisi wilayah. Pelibatan para pemangku kepentingan merupakan salah satu aspek penting untuk mencapai target pengendalian perubahan iklim di tingkat nasional

maupun global. Kampung Iklim adalah lokasi yang berada di wilayah administratif paling rendah setingkat rukun warga atau dusun dan paling tinggi setingkat kelurahan atau desa, atau wilayah yang masyarakatnya telah melakukan upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim secara berkesinambungan.

ProKlim dapat menjadi tempat edukasi bagi masyarakat untuk belajar, memotivasi mereka untuk menjadi pelaku perubahan di lingkungan tempat tinggalnya. Penguatan aksi adaptasi perubahan iklim di tingkat tapak melalui ProKlim sangat diperlukan terutama pada daerah yang teridentifikasi rentan terhadap dampak perubahan iklim. Pada saat kerentanan dapat diatasi dengan upaya peningkatan kapasitas adaptasi, yang kemudian menjadi hal yang dilakukan sehari-hari oleh masyarakat, maka masyarakat tersebut dapat dikatakan memiliki ketahanan (*resiliensi*) terhadap perubahan iklim. ProKlim menerapkan konsep pemberdayaan masyarakat (*Community Based Development*), dimana kegiatan yang dilaksanakan oleh masyarakat beserta institusinya dalam memobilisasi dan mengelola sumberdaya manusia maupun sumberdaya alam di dalam desa maupun yang berasal dari luar desa diarahkan untuk memperkuat upaya adaptasi dan mitigasi terhadap dampak perubahan iklim. Dalam penilaian ProKlim, komponen yang masuk dalam syarat penilaian adalah kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim yang dilakukan oleh masyarakat. Selain itu, kelompok masyarakat yang terbentuk sebagai dukungan yang berkelanjutan dari ProKlim yang merupakan perwujudan dari peran masing-masing-masing masyarakat di wilayah proklm tertentu melalui partisipasi.

Prinsip pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan ProKlim adalah berbasis masyarakat (*community based*), berbasis sumber daya setempat (*local resource based*) dan berkelanjutan (*sustainable*). Kapasitas masyarakat dapat dicapai melalui upaya pemberdayaan (*empowerment*) agar anggota masyarakat dapat ikut dalam proses yang berlangsung atau institusi penunjang dalam proses produksi, kesetaraan (*equity*) dengan tidak membedakan status dan keahlian, keamanan (*security*), keberlanjutan (*sustainability*) dan kerjasama (*cooperation*), yang semuanya berjalan secara simultan.

2.1.2.2 Tujuan Program Kampung Iklim

Tujuan adanya program kampung iklim dalam (*Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia, 2012*) adalah:

- a. Menumbuhkan kemandirian masyarakat dalam melaksanakan adaptasi perubahan iklim, termasuk menjaga nilai-nilai kearifan tradisional atau lokal yang dapat mendukung upaya penanganan perubahan iklim dan pengendalian kerusakan lingkungan secara umum.
- b. Menjembatani kebutuhan masyarakat dan pihak-pihak yang dapat memberikan dukungan untuk pelaksanaan aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.
- c. Meningkatkan kerjasama seluruh pihak di tingkat nasional dan daerah dalam memperkuat kapasitas masyarakat untuk melaksanakan upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.
- d. Menumbuhkan gerakan nasional adaptasi dan mitigasi perubahan iklim melalui pelaksanaan kegiatan berbasis masyarakat yang bersifat aplikatif, adaptif dan berkelanjutan
- e. Mengoptimalkan potensi pengembangan kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim yang dapat memberikan manfaat terhadap aspek ekologi, ekonomi dan pengurangan bencana iklim.
- f. Mendukung program nasional yang dapat memperkuat upaya penanganan perubahan iklim secara global seperti gerakan ketahanan pangan, ketahanan energi, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pencapaian target penurunan emisi sebesar 26% pada tahun 2020 dibandingkan dengan jika tidak dilakukan upaya apapun.

2.2.1 Kategori Program Kampung Iklim

Menurut Peraturan Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim nomor:P.1/PPI/SET/KUM.1/2/2017 pasal 1 dalam (Rekavianti, 2019) bahwa penetapan suatu lokasi sebagai kampung iklim, terdapat 4 tingkatan yang berbeda berdasarkan kapasitas dan presentase nilai yang diperoleh oleh masing-masing lokasi diantaranya:

- a. Proklim Pratama adalah lokasi Proklim yang ditetapkan dalam hal presentase nilai akhir Proklim sampai dengan 50 %.
- b. Proklim Madya adalah lokasi Proklim yang ditetapkan dalam hal presentase nilai akhir Proklim antara 51-81 %.
- c. Proklim Utama adalah lokasi Proklim yang ditetapkan dalam hal presentase nilai akhir Proklim diatas 81 %.
- d. Proklim Lestari adalah lokasi Proklim ditetapkan dalam hal usulan Proklim telah mendapat penghargaan sebagai nominasi Proklim utama. Untuk menjadi kampung ini, masyarakat harus mampu membina minimal 10 lokasi untuk melaksanakan kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim yang kemudian mengikuti Proklim.

2.1.2.3 Strategi Program Kampung Iklim

Dalam (Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia, 2012) Pelaksanaan ProKlim menerapkan pendekatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim berbasis masyarakat berdasarkan prinsip kemitraan. Dengan pendekatan tersebut para pemangku kepentingan berinteraksi secara aktif dalam proses penyelesaian masalah terkait perubahan iklim untuk memperkuat kapasitas sosial di tingkat lokal maupun nasional. Strategi pelaksanaan program secara umum adalah sebagai berikut:

- a. Memperkuat kapasitas pemerintah daerah dalam mendukung upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.
- b. Memperkuat kapasitas masyarakat dalam melaksanakan upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim
- c. Menjalin kemitraan dengan kementerian/lembaga terkait, pemerintah daerah, dunia usaha, dan lembaga non-pemerintah.
- d. Mendorong terciptanya kepemimpinan di tingkat masyarakat untuk menjamin keberlang

2.1.2.4 Ruang Lingkup ProKlim

Adaptasi perubahan iklim adalah upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menyesuaikan diri terhadap dampak perubahan iklim, termasuk keragaman iklim dan kejadian iklim ekstrim sehingga

potensi kerusakan akibat perubahan iklim berkurang, peluang yang ditimbulkan oleh perubahan iklim dapat dimanfaatkan, dan konsekuensi yang timbul akibat perubahan iklim dapat diatasi (Emilda et al., 2017). Mitigasi perubahan iklim adalah kegiatan yang dilakukan sebagai bentuk upaya penanggulangan dampak perubahan iklim. Pekarangan lestari (pemanfaatan lahan pekarangan) sebagai salah satu contoh upaya mitigasi perubahan iklim yang dilakukan masyarakat. Beberapa kegiatan lain yang dapat dilakukan sebagai upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. program/kegiatan penguatan aksi lokal adaptasi dan mitigasi perubahan iklim

a. Adaptasi perubahan Iklim

Kegiatan yang terkait dengan upaya adaptasi merupakan upaya masyarakat dalam menyesuaikan diri terhadap perubahan iklim, antara lain:

- 1) Pengendalian kekeringan, banjir dan longsor;
- 2) Peningkatan ketahanan pangan; salah satunya melalui pekarangan lestari
- 3) Penanganan atauantisipasi kenaikan muka laut, rob, intrusi air laut, abrasi, atau erosi akibat angin, gelombang tinggi;
- 4) Pengendalian penyakit terkait iklim; dan
- 5) Kegiatan-kegiatan lain yang terkait dengan upaya peningkatan penyesuaian diri terhadap perubahan iklim.

b. Mitigasi Perubahan Iklim

Pada dasarnya upaya mitigasi merupakan kegiatan pencegahan terhadap peningkatan emisi gas rumah kaca ke atmosfer. Upaya mitigasi terhadap dampak perubahan iklim, antara lain:

- 1) Penanganan lahan rendah emisi gas rumah kaca;
- 2) Penggunaan energi baru terbarukan serta konservasi dan penghematan energi;
- 3) Pengelolaan sampah, limbah padat, dan cair;
- 4) Peningkatan dan/atau mempertahankan tutupan vegetasi;
- 5) Pencegahan dan penganggulangan kebakaram hutan dan lahan;
- 6) Kegiatan lain yang terikat dengan upaya penurunan emisi gas rumah kaca.

c. Kelembagaan dan Dukungan Keberlanjutan

Kelembagaan yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan ProKlim tidak hanya kelembagaan tingkat tapak, namun juga kelembagaan yang terdapat di tingkat kabupaten/kota/provinsi (Dinas Lingkungan Hidup) hingga Pemerintah (KLHK) termasuk unit pelaksana teknis yang secara langsung bertanggungjawab dalam ProKlim, antara lain:

- 1) Kelembagaan Masyarakat
- 2) Dukungan kebijakan terkait pengendalian perubahan iklim
- 3) Partisipasi masyarakat
- 4) Kapasitas Masyarakat
- 5) Dukungan sumberdaya eksternal
- 6) Pengembangan kegiatan
- 7) Pengelolaan data aksi
- 8) Manfaat terhadap ekonomi, sosial, dan lingkungan

2.2 Hasil Penelitian yang Relevan

- 2.2.1 Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Maria Sose (Sose, 2021) dengan judul “Faktor-Faktor Penyebab Kurangnya Partisipasi Masyarakat Eks Timor Leste Dalam Pembangunan Dan Upaya Untuk Meningkatkan Di Desa Silawan Kecamatan Tasifeto Timur Kabupaten Belu”. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dimana dalam penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti juga menggunakan kualitatif deskriptif. Hasil penelitian dalam skripsi ini yaitu kurangnya partisipasi masyarakat Eks Timor Leste karena ada beberapa faktor yang menyebabkan sehingga masyarakat Eks Timor Leste kurang berpartisipasi, antara lain a) Pendidikan; b) Kesadaran dan Kemauan; Pendapatan atau Penghasilan. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan mengenai faktor yang melatarbelakangi partisipasi Masyarakat dalam pelaksanaan Program Kampung Iklim (Proklim).
- 2.2.2 Penelitian jurnal yang dilakukan oleh M. Taufiki Rochman, Marijono, dan Niswatul Imsiyah (Rochman et al., 2017) dengan judul “Faktor-Faktor Penyebab Rendahnya Partisipasi Warga Belajar Dalam Program

Keaksaraan Fungsional Di Kelurahan Antirogo Kecamatan Summersari Kabupaten Jember” jurusan Pendidikan Luar Sekolah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya partisipasi Masyarakat dalam program keaksaraan fungsional disebabkan karena faktor internal (motivasi, pekerjaan, dan usia warga belajar) dan faktor eksternal meliputi jarak warga belajar dengan tempat pembelajaran dan metode yang digunakan selama proses pembelajaran. Hasil penelitian tersebut sejalan dengan teori menurut Sunarti (2003) bahwa partisipasi Masyarakat disebabkan oleh faktor internal (ekonomi, sosial, dan perubahan sikap/perilaku) dan eksternal (intensitas sosialisasi, stimulus dari pemerintah atau pihak luar, keaktifan fasilitator, pengaruh masyarakat dari luar).

- 2.2.3 Penelitian jurnal yang dilakukan oleh Imam Luqmana (Luqmana, 2017) dengan judul “Studi Kasus Analisis Rendahnya Partisipasi Masyarakat Pada Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Di Desa Ketangirejo Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan” jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Hasil penelitian menunjukkan berdasarkan wawancara dengan para informan terkait dengan rendahnya partisipasi masyarakat pada program PNPM desa Ketangirejo yang merupakan faktor-faktor yang mempengaruhinya adalah usia, tingkat pendidikan, tingkat pendapatan dan tingkat pengetahuan. Faktor eksternal adalah manajemen program/sosialisasi program. Hasil penelitian tersebut sejalan dengan teori yang digunakan penulis menggunakan teori Sunarti (2003) faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi Masyarakat. Penelitian tersebut sejalan dengan penelitian penulis yaitu menggunakan teori Sunarti (2003) untuk mengetahui faktor yang meletarbelakangi rendahnya partisipasi yang disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal.
- 2.2.4 Penelitian yang dilakukan oleh Rafi’atul Hadawiyah dkk (2021) dengan judul “Partisipasi Masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan

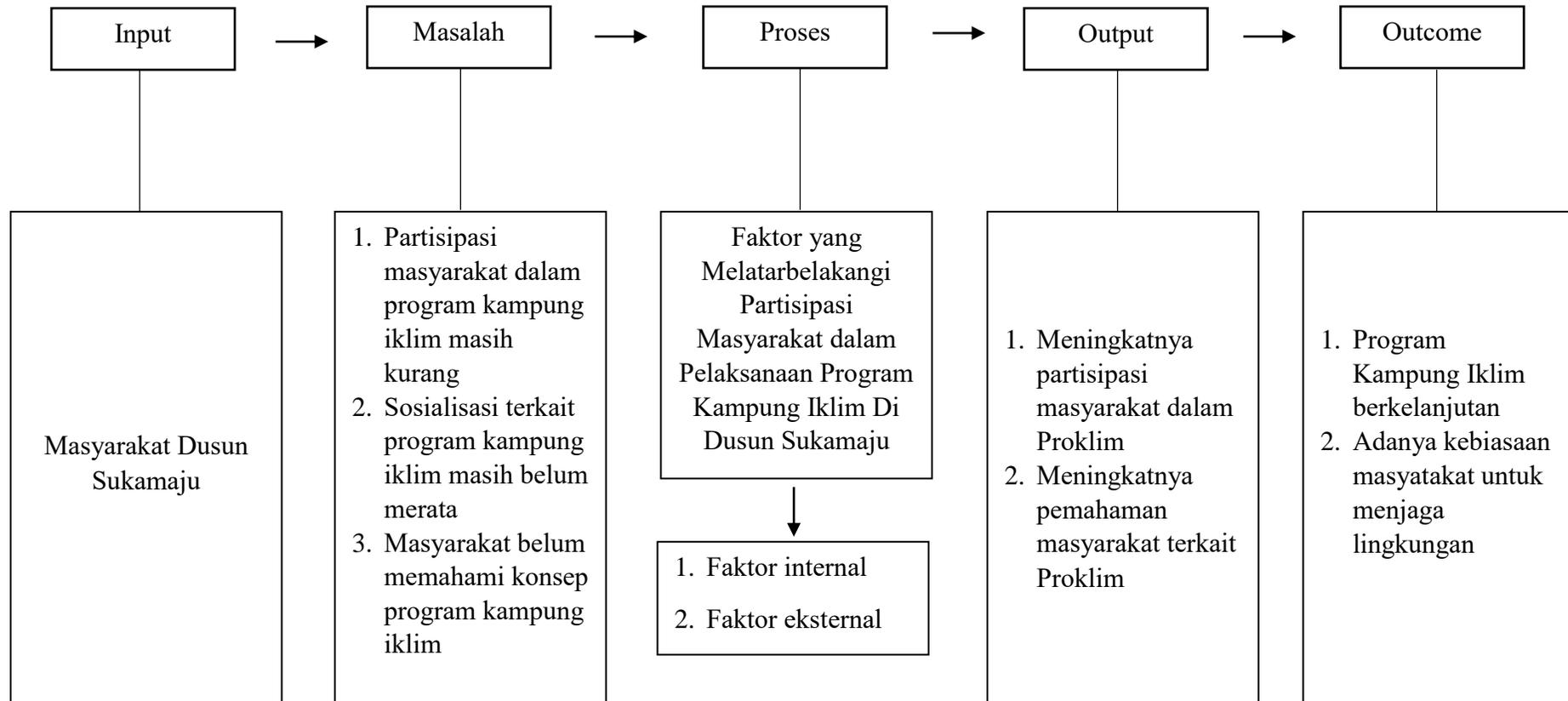
Pembangunan Desa” Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Metode yang digunakan melalui pendekatan kualitatif sama dengan metode penelitian yang digunakan peneliti. Hasil penelitian menunjukkan partisipasi masyarakat dalam musrenbang desa masih rendah dengan kehadiran masyarakat belum sepenuhnya menghadiri undangan pada pelaksanaan musrenbang desa karena didasari dengan beberapa alasan salah satunya ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa untuk memberikan hasil keputusan dan partisipasi masyarakat dalam bentuk memberikan usulan untuk dijadikan prioritas program serta memberikan saran/kritikan terhadap sebuah program yang ditawarkan juga masih rendah berdasarkan dari tingkat kehadiran masyarakat. Adapun Faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam musrenbang desa adalah faktor internal terdiri dari rendahnya kesadaran masyarakat, tingkat pendidikan, dan pekerjaan serta penghasilan masyarakat. Dan faktor eksternal terdiri dari peran pemerintah Desa seperti kurangnya sosialisasi dan Fasilitas sarana dan prasarana yang dibutuhkan.

- 2.2.5 Penelitian yang dilakukan oleh Chika Chaerunnissa dengan judul “Partisipasi Masyarakat Dalam Program Penyediaan Air Minum Dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) Di Kabupaten Brebes”. Metode penelitian yang digunakan deskriptif kualitatif sama dengan metode yang digunakan peneliti dalam penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk partisipasi masyarakat pada perencanaan di Desa Legok dan Desa Tambakserang berupa sumbangan pikiran dalam bentuk usulan, saran dan kritik, saat pelaksanaan berupa tenaga dan uang dan keberlanjutan program berupa uang. Faktor-faktor yang mempengaruhi Desa Legok dan Desa Tambakserang adalah faktor internal dan eksternal. Faktor internal Desa Legok meliputi usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, tingkat pendapatan dan pengetahuan, Pemda dan konsultan/TFM sebagai faktor eksternal kedua desa yang mempengaruhi seluruh partisipasi masyarakat.

2.3 Kerangka Konseptual

Sebuah kerangka konseptual adalah alat yang digunakan peneliti untuk membimbing penelitian. Alat tersebut berupa ide yang digunakan untuk struktur penelitian, termasuk pertanyaan penelitian, tinjauan *literature*, metode dan analisis data. Kerangka konseptual dalam penelitian ini menjelaskan gambaran logis dan pola dari kerangka penelitian agar penelitian ini lebih terarah. Dalam penelitian ini untuk mengatasi dampak perubahan iklim, pemerintah membuat Program Kampung Iklim melalui kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.

Dalam penelitian ini untuk mengatasi dampak perubahan iklim, pemerintah membuat Program Kampung Iklim melalui kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Dalam pelaksanaan proklamasi Dusun Sukamaju masyarakat sebagai pelaksana program belum mampu memaksimalkan peran sosialnya sebagai masyarakat. Partisipasi masyarakat menjadi salah satu permasalahan dalam pelaksanaan program kampung iklim yaitu pada kegiatan pekarangan lestari. Hal tersebut disebabkan karena sosialisasi yang telah dilakukan dari Dinas belum mampu menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam program kampung iklim. Selain itu, rendahnya pemahaman masyarakat terkait konsep program kampung iklim itu sendiri menjadi penyebab partisipasi masyarakat dalam proklamasi masih rendah. Proses penyelesaian permasalahan tersebut melalui penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti dengan mencari faktor-faktor apa saja yang melatarbelakangi partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program kampung iklim di Dusun Sukamaju. Peneliti mengacu pada teori terkait tinggi dan rendahnya partisipasi masyarakat dalam suatu program ditentukan oleh dua faktor yaitu, faktor internal yang berasal dari dalam individu dan faktor eksternal yang berasal dari luar individu. Setelah diketahui, maka diperlukan pembinaan lebih lanjut agar masyarakat lebih tergerak untuk aktif berpartisipasi dalam proklamasi sehingga akan menghasilkan *output* berupa adanya peningkatan partisipasi masyarakat dan masyarakat menjadi paham konsep proklamasi. Dampak lain berupa *outcome* dari proklamasi itu sendiri dapat terus berjalan dan berkelanjutan, serta adanya kebiasaan masyarakat untuk menjaga lingkungan.



Gambar 2. 1 Kerangka konseptual

2.4 Pertanyaan Penelitian

Pertanyaan penelitian yaitu sebuah pernyataan keingintahuan tentang suatu topik yang diperoleh secara sistematis melalui pengaruh latar belakang keilmuan peneliti, sehingga menginspirasi proses pencarian yang terarah dan merangsang diskusi tentang solusi potensial. Pertanyaan dari penelitian ini adalah “Faktor-faktor apa saja yang melatarbelakangi partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program kampung iklim?”